

Dinasti Politik dalam Konteks Demokrasi Lokal (Studi Keberlanjutan Politik Dinasti Kerry Saiful Kongoosa pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024)

Muhammad Ishak Syahadat¹, Iriyani Astuti Arief², La Ode Efrianto³

^{1,2,3}*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari,*

Correspondence email : ishaksyahadat@gmail.com

Diterima: 28/07/2024. Direvisi: 18/08/2024. Diterbitkan: 21/08/2024

Abstract

This article aims to determine how sustainable the politics of the Kerry Kongoosa dynasty will be in the 2024 Konawe Regency Regional Head Election. This research uses political capital theory which consists of economic capital and social capital. Meanwhile, the data collection techniques used were distributing questionnaires, interviews, and literature studies with data analysis techniques which consisted of three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results found that Kerry Kongoosa's family politics succeeded in including his wife and two children in legislative institutions at various levels such as the DPR RI, and DPRD Southeast Sulawesi in 2019. Furthermore, in the 2024 simultaneous elections, the potential for continuity of Kerry Kongoosa's political dynasty through his children is open to the opportunity to fight again. The emergence of family politics can be seen from three dominant perspectives, namely the weakness of political parties, the presence of Strong Man, and the legacy of popularity from previous leaders. However, there are core resources that political experts have missed regarding family politics in forming family politics by looking at the use of political capital, economic capital, and social capital owned by Kerry Kongoosa's family politics in the simultaneous Regional Head Elections in 2024.

Keywords: *dynastic politics, election, regional head, democracy*

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana keberlanjutan politik dinasti Kerry Kongoosa pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe tahun 2024. Riset ini menggunakan teori modal politik yang terdiri dari modal ekonomi, dan modal sosial. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuisioner, wawancara, dan studi pustaka dengan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa politik keluarga Kerry Kongoosa berhasil memasukkan istri dan kedua anaknya di lembaga legislatif di berbagai level seperti DPR RI, DPRD Sulawesi Tenggara tahun 2019. Selanjutnya pada pemilihan serentak tahun 2024, potensi keberlanjutan dinasti politik Kerry Kongoosa melalui anaknya terbuka peluangnya untuk kembali bertarung. Munculnya politik keluarga dapat dilihat dari tiga perspektif dominan yakni lemahnya partai politik, hadirnya Strong Men dan warisan popularitas dari pemimpin sebelumnya. Namun

terdapat sumber daya inti yang luput dari penglihatan pakar politik terkait politik keluarga dalam membentuk politik keluarga dengan melihat penggunaan modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial yang dimiliki oleh politik keluarga Kerry Konggoasa pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Kata kunci : politik dinasti, pemilu, kepala daerah, demokrasi

1. Pendahuluan

Hajat demokrasi Indonesia masih akan berlanjut. Usai perhelatan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg), yang berlangsung pada bulan Februari 2024 lalu. Rakyat Indonesia akan segera menyambut Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada bulan November 2024. Menurut laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Namun yang menarik dari hajatan demokrasi tingkat lokal ini adalah munculnya figur-figur yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya. Fenomena ini sering disebut dengan dinasti politik. Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga (Fitri, 2019). Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti dapat dianalisis dari dua hal yakni, *pertama*, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi *status quo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana (Djati, 2013). Kedua gejala umum tersebut menimbulkan adanya sikap pro dan kontra dalam pemahaman dinasti politik tersebut. Sikap pro dan kontra kemudian berkembang menjadi perdebatan diskursus dalam revisi RUU Pilkada. Di satu sisi, ada pihak menginginkan pembatasan dinasti politik dengan cara membatasi sanak saudara kepala daerah untuk maju dalam Pemilukada, sementara yang lain mengusulkan dinasti politik tak perlu dilarang, hanya saja sistem kaderisasi partai politik di daerah perlu dibenahi (Priatno, 2016).

Adanya sikap pro dan kontra terhadap kemunculan dinasti politik tersebut sangatlah erat kaitannya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya politik sendiri berkaitan dengan preferensi kekuasaan yang dibangun baik dari segi penerimaan publik maupun pembangunan rezim (Fitzpatrick, 2000). Aksentuasi budaya politik dalam membahas dinasti sebenarnya sudah dilakukan dalam berbagai sudut pandang seperti halnya neo-patrimonialisme, klan politik, dan predator politik. (Zuhro, 2010) mengungkapkan bahwa pendekatan neo-patrimonialisme menunjukkan bagaimana

dinasti politik menjadi ekses negatif dari otonomi daerah. Menurut perspektif ini, demokrasi dapat terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, baik yang didasarkan pada relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis, yang semuanya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan famili (Marijan, 2006). Hal itulah yang kemudian memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman dinasti dalam perspektif ini. Dinasti politik sebagai elit tunggal diartikan hanya satu kelompok elit yang menguasai jalannya politik dan pemerintahan (Fanky, 2011). Dinasti politik dalam tipologi elit ini bentuknya prismatic: dinasti politik bertindak sebagai elit memerintah (*Governing Elite*) yang memiliki hubungan patronase dengan berbagai pihak, utamanya tokoh informal yang memiliki pengaruh sosio-politik maupun sosio-kultural dalam masyarakat (*Non Governing Elite*), dan juga masyarakat (*Non-Elite*) (Hidayati, 2014). Adapun patronase tersebut diwujudkan dengan cara mengunci pos-pos penting dalam pemerintahan dan masyarakat oleh orang-orang terdekat (Allen, 2012). Hal ini dilakukan sebagai upaya meredam demonstrasi masyarakat karena sadar bahwa jumlah elit tunggal ini sebenarnya lebih sedikit sehingga cara itu dilakukan untuk mengefektifkan kekuasaan (Badoh, 2010).

Keberadaan politik dinasti bukan hal yang baru dalam pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan temuan riset sebelumnya, pada periode 2017-2020 terdapat 3 kali pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Pilkada tahun 2017 yang diikuti oleh 94 kabupaten/Kota, Pilkada tahun 2018 yang diikuti oleh 153 Kabupaten/Kota, dan pilkada tahun 2020 yang diikuti oleh 261 Kabupaten/Kota. Sehingga total peserta Pilkada adalah 508 Kabupaten/Kota. Dari total 508 Kabupaten/Kota peserta Pilkada, terdapat 247 Kabupaten/Kota yang terindikasi dinasti politik dimana terdapat kandidat Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pimpinan Nasional/pimpinan Kepala Daerah/Anggota Dewan yang berada di DPR/DPRD baik yang masih berkuasa ataupun berkuasa pada periode sebelumnya. Dan dari 247 Kabupaten/Kota tersebut, kandidat dinasti politik menang di 170 Kabupaten/Kota (69%). Sementara, jumlah kandidat bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota yang terindikasi dinasti politik sebanyak 3015 orang atau sebesar 10% dari total 3.030 orang jumlah kandidat. Walaupun hanya 10% jumlah kandidat yang terindikasi dinasti politik, namun rasio kemenangan dinasti politik mencapai 69%, sehingga kandidat bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota yang terindikasi dinasti politik memiliki probabilitas yang besar untuk memenangi pilkada (Yuliantiningsih & Adrison, 2022).

Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak. Di Propinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten/Kota yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sebanyak 17 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Dari 17 Kabupaten/Kota yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah secara serentak (News.detik.com, 2024), ada 1 Kabupaten yang mana salah satu figur yang digadang-gadang oleh publik dan sudah mengikuti proses politik diantaranya seperti sosialisasi dimasyarakat adalah

anak bupati pada periode sebelumnya yang ada di Kabupaten Konawe, yaitu Fachri Pahlevi Konggoasa. Kabupaten Konawe adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang selama sepuluh tahun di pimpin oleh Kerry Saiful Konggoasa. Dimana Selama 10 tahun menjabat sebagai bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa sudah menempatkan anak dan istrinya di pemerintahan baik itu di level DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR-RI. Pada pemilu 2019 Kerry Saiful Konggoasa berhasil menempatkan anak dan istrinya hampir semua level legislatif. Fachri Pahlevi Konggoasa yang merupakan putra kandung dari Kerry Saiful Konggoasa berhasil mendapatkan satu kursi DPR-RI dapil Sulawesi Tenggara dengan suara terbanyak sekitar 90 ribu suara, dari Partai Amanat Nasional. Kemudian disusul oleh anggota keluarga lainnya, putri kandung dari Kerry Saiful Konggoasa yaitu Devi Thesya Feriska terpilih di DPRD Kabupaten Konawe dari partai Amanat Nasional, dengan perolehan suara sebanyak 29 ribu. Kemudian istri pertama dari Kerry Saiful Konggoasa yaitu Titin Nurbaya Saranani lolos di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan partai yang sama. Mereka lolos di pemilihan Legislatif pada saat Kerry Saiful Konggoasa menjabat sebagai Bupati Konawe untuk periode kedua (MK, 2019).

Pada pemilihan Kepala daerah yang akan berlangsung di bulan November yang akan datang, Kerry Saiful Konggoasa sudah menyiapkan putra mahkota untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di kabupaten Konawe. Hal ini dibuktikan dengan terpasangnya baliho berukuran besar foto Fachri Pahlevi dengan tulisan calon bupati Kabupaten Konawe tahun 2024-2029 di beberapa titik strategis di Kabupaten Konawe. Selain baliho sebagai wadah untuk sosialisasi, Fachri juga sering turun langsung ketemu masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa dirinya akan maju sebagai Calon Kepala Daerah berikutnya menggantikan Kerry Saiful Konggoasa yang notabenehnya adalah ayahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh penulis, selama bulan Januari dan Februari 2024 Fachry Pahlevi secara rutin telah mengumpulkan tim relawan dan pendukungnya guna menyiapkan strategi untuk bertarung menjadi Kepala Daerah Kabupaten Konawe berikutnya. Bukan hal yang mustahil Fachry Pahlevi Konggoasa bakal menjadi Kepala Daerah berikutnya mengingat modal politik dan modal sosial kuat yang ditinggalkan oleh Kerry pada saat menjabat sebagai Bupati Konawe, potensi keberlanjutan dinasti Kerry Saiful Konggoasa di Kabupaten Konawe punya peluang untuk menjadi kenyataan. Tetapi publik perlu mengingat bahwa pada Pilkada mendatang yang akan berlangsung pada bulan November, Kerry Saiful Konggoasa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Daerah Konawe. Posisi tersebut telah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini menjadi ujian bagi Klan Konggoasa, apakah akan mampu mempertahankan dinasti politik mereka, atau apakah mereka akan memberikan kesempatan bagi figur lain di luar lingkaran keluarga Konggoasa untuk bersaing dalam Pilkada yang dijadwalkan pada November 2024.

Ada beberapa Penelitian terdahulu yang mengangkat topik politik dinasti Kerry Saiful Konggoasa, seperti penelitian (Sutiawati, 2019) yang berjudul Modal Politik Keluarga

Konggoasa Pada Pemilu 2019. Substansi penelitian ini adalah bagaimana kekuasaan Kerry Saiful sebagai Bupati Kabupaten Konawe bisa mengantarkan anak dan istrinya menjadi anggota Legislatif di semua level mulai dari DPRD Kabupaten, Propinsi hingga DPR-RI. Selain itu, penelitian lainnya yang ditulis oleh (Arsyad & Nasir, 2020) berjudul Strategi Politik Fachry Pahlevi Konggoasa atas terpilihnya menjadi anggota DPR-RI tahun 2019. Temuan dari penelitian ini, terpilihnya Fachry Konggoasa menjadi anggota DPR-RI lebih pada kekuatan strategi politik dan strategi komunikasi yang efektif dijalankan oleh tim kampanye di lapangan dengan menggandeng Kerry Sayful Konggoasa dalam sosialisasi pada saat kampanye. Yang menarik dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kami lakukan adalah pada saat Fachry Pahlevi Konggoasa menyatakan diri untuk maju di pilkada serentak pada bulan November 2024, dimana Kerry Saiful Konggoasa sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Konawe. Artikel ini mengeksplorasi apakah warisan modal politik dan sosial yang ditinggalkan oleh Kerry masih cukup kuat untuk mendukung kemenangan putranya, Fachri Pahlevi, dalam Pilkada 2024 mendatang.

2. Metode Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah keberlanjutan Politik Dinasti Kerry Saiful Konggoasa dalam Pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe tahun 2024, dengan menggunakan pendekatan politik dinasti. Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan responden penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive* atau disengaja, dengan sebaran responden mewakili semua populasi di semua Kecamatan. Jumlah kuisioner atau yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Konawe yang berusia di atas 17 tahun atau yang menjadi wajib pilih berdasarkan data DPT KPU Kabupaten Konawe tahun 2024 sebanyak 183.060 orang. Sementara sampel atau jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 400 responden yang tersebar di 28 Kecamatan dan 40 Kelurahan/Desa. Dengan *margin of eror* dalam penelitian ini $\pm 5\%$, dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain melibatkan responden dalam pengumpulan data, penulis juga menyertakan studi pustaka, dengan melakukan pengumpulan data langsung di lokasi penelitian. Data tersebut didukung oleh dokumen-dokumen resmi dari KPUD Kabupaten Konawe dan informasi yang diambil dari situs web resmi, seperti Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep dinasti politik dengan pendekatan modal politik yang dilakukan dengan tiga tahapan yakni: reduksi data/informasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi, serta temuan baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait politik dinasti dan demokrasi lokal.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan yang dianalisis menggunakan teori modal yang terdiri dari modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial, untuk memprediksi keberlanjutan dinasti keluarga Kerry Saiful Konggoasa pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang diikuti oleh anak kandung Kerry Konggoasa, dalam hal ini adalah Fachri Pahlevi Konggoasa. Pada pemilihan umum tahun 2019 Kerry Konggoasa menempatkan anak dan istrinya sebagai anggota Legislatif baik di DPRD Kabupaten, Propinsi maupun DPR-RI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1.
Sebaran Keluarga Kerry Saiful Konggoasa Yang Menang Pada Pemilu 2019

Dinasti	Keluarga Terpilih pada Pemilu 2019	Latar Belakang Pekerjaan	Keterangan
Kerry Sayful Konggoasa (Bupati Kab. Konawe periode 2013-2023)/PAN	Fachry Pahlevi Konggoasa (Anak Kerry S. Konggoasa)	Swasta	Anggota DPR RI 2019 Dapil Sultra/PAN
	Devi Thesia Feriska Konggoasa (Anak Kerry Saiful Konggoasa)	Swasta	Anggota DPRD Kabupaten Konawe 2019/PAN
	Titin Nurbaya Saranani (Istri Kerry S. Konggoasa)	Ibu Rumah Tangga	Anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/PAN

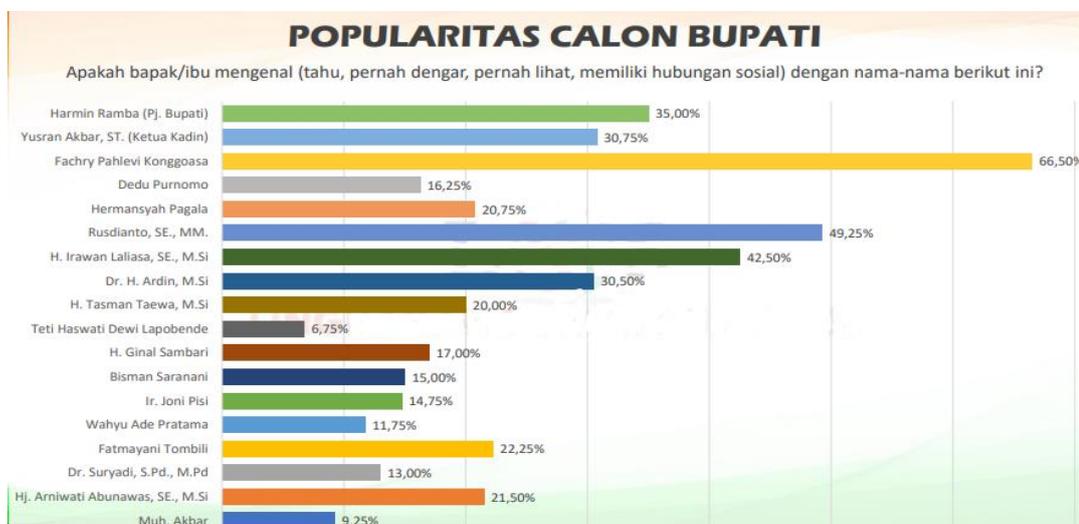
Sumber: diolah dari data penelitian, 2024

3.1 Modal Politik Fachry Pahlevi Konggoasa

Pembentukan politik keluarga Kery Konggoasa di mulai dari keterpilihan anak pertama dari istri pertama Kery Konggoasa, Fachry Pachlevi Konggoasa, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dapil Sulawesi Tenggara, pada Pemilu tahun 2019. Menariknya, sosok Fachry Konggoasa pada kontestasi politik Sulawesi Tenggara masih dapat dikategorikan sebagai pendatang baru. Meskipun Fachry Konggoasa pernah memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Konawe pada periode 2017-2018, namun rekam jejak Fachry Konggoasa di bidang politik baru dimulai ketika Facry Konggoasa menjadi anggota Barisan Muda (BM) PAN pada tahun 2018. Keberhasilan Fachry Konggoasa pada Pemilu 2019 juga meningkatkan karir politiknya sehingga diberi kepercayaan menjadi ketua DPD PAN periode 2021-2026. (Sutiawati, 2019)

Kemenangan Fachry Konggoasa pada Pemilu 2019 menoreh catatan khusus tentang betapa matangnya politik Keluarga Kery Konggoasa di Sulawesi Tenggara. Sebagai satu-satunya generasi muda yang terpilih menjadi Anggota DPR RI, Fachry Konggoasa tidak hanya berhasil meraih suara tertinggi pada pemilihan Anggota DPR-RI di Tahun 2019, akan tetapi dia juga ikut mengalahkan politisi senior berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada konstelasi Pemilu 2019, Daerah Pemilihan (Dapil) untuk tingkatan DPR RI hanya terdapat 1 Dapil yaitu Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara. Fachry Konggoasa berkompetisi memperoleh suara pemilih pada level, tingkatan, dan daerah yang sama dengan Calon Legislatif (Caleg) lainnya yang tersebar di Partai Politik se- Sulawesi Tenggara. Fachry Konggoasa berhasil memenangkan 101.727 perolehan suara. Jumlah perolehan suara tersebut dinilai sangat besar karena mampu mengalahkan lima calon legislatif terpilih lainnya yaitu Rusdah Mahmud (DEMOKRAT) dengan perolehan suara sebesar 48.139, Tina Nur Alam (NASDEM) dengan perolehan suara 39.076, Ir. Hugua (PDIP) dengan perolehan suara 70.741, Ir. Ridwan Bae (GOLKAR) dengan perolehan suara 97.602 dan Imran (GERINDRA) dengan Perolehan suara 61.087. (KPU, 2024). Dengan pengalaman sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024, Fachri Pahlevi Konggoasa mendapatkan modal politik yang kuat untuk bertarung pada PILKADA serentak tahun 2024. Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan Fachri Pahlevi Konggoasa menempati posisi pertama dari aspek popularitas, mengalahkan figure/bakal calon yang lain untuk bertarung menjadi bupati Kabupaten Konawe pada periode 2024-2029.

Grafik 1.
Popularitas Bakal Calon Bupati Kabupaten Konawe periode 2024-2029

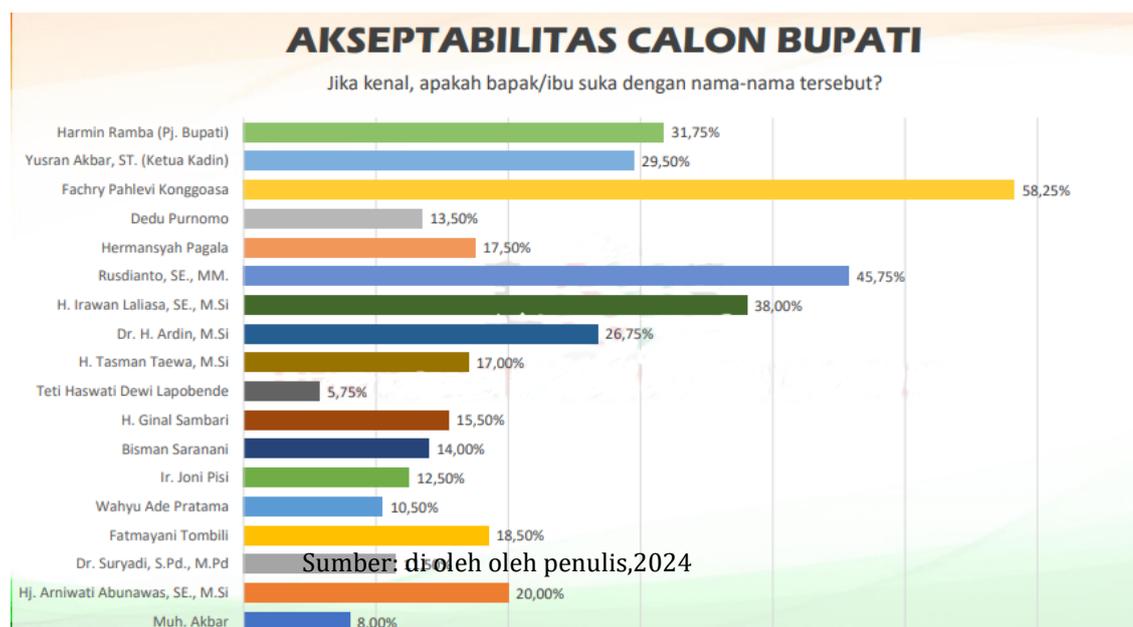


Sumber: diolah dari data penelitian, 2024

Grafik di atas menunjukkan tingkat popularitas Fachri Pahlevi Konggoasa di masyarakat Kabupaten Konawe masih sangat tinggi dibanding bakal calon yang lain. Popularitasnya menyentuh angka 66,50%. Kemudian di ikuti oleh Rusdianto sebesar 49,25%, Irawan Lalasa sebesar 42,50%, sementara PJ Bupati Konawe Harmin Ramba sebesar 35%, Yusran Akbar sebesar 30,75%. Sementara bakal calon yang lain tingkat popularitasnya rata-rata masih berada dibawah angka 20%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka popularitas Fachri Pahlevi Konggoasa di antaranya adalah, hubungan emosional yang dibangun oleh Kerry Konggoasa (bapak dari Fachri Konggoasa) selama menjabat sebagai kepala daerah selama 10 tahun sangat baik, ini berbanding lurus dengan tingkat kesukaan masyarakat kepada Fachri Pahlevi, dan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Fachri Pahlevi Konggoasa selama menjabat sebagai anggota DPR-RI.

Selain tingkat popularitas yang tinggi, tingkat kesukaan masyarakat atau Aksepbilitas terhadap bakal calon bupati Konawe Fachri Pahlevi juga terbilang sangat tinggi dan masih mengungguli bakal kandidat yang lain.

Grafik 2.
Aksepbilitas calon bupati Kabupaten Konawe



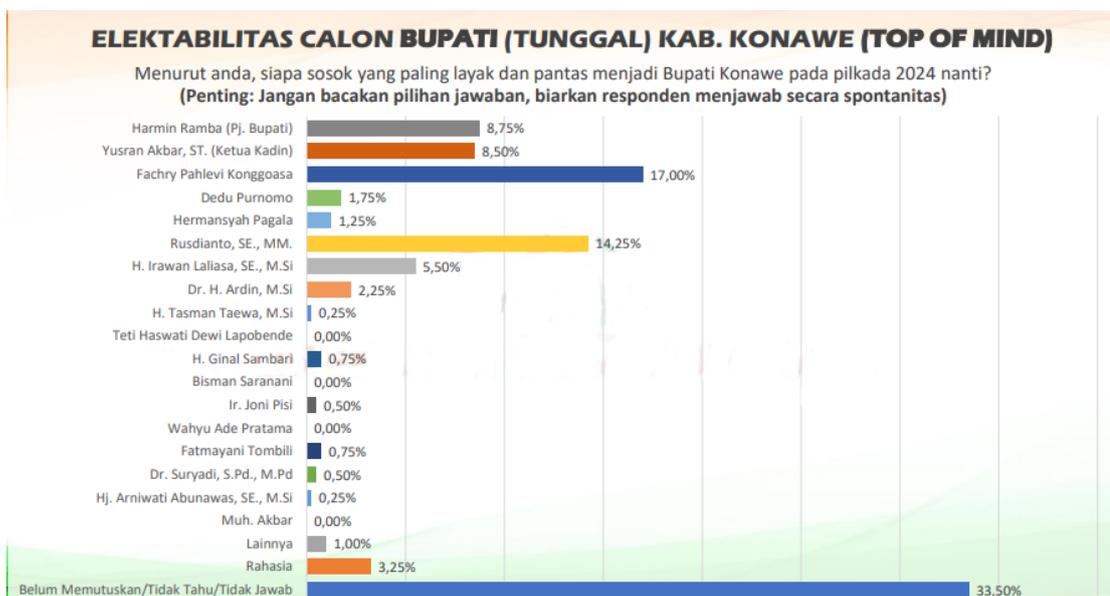
Sumber: diolah dari data penelitian, 2024

Grafik di atas menunjukkan tingkat kesukaan terhadap Fachri Pahlevi Konggoasa terbilang tinggi dibandingkan dengan kandidat lain yaitu sebesar 58,25%. Di ikuti oleh Rusdianto sebesar 45,75%, kemudian berturut-turut Irawan Lalasa sebesar 38%, Harmin Ramba sebesar 31,75%, Yusran Akbar sebesar 29,50%. Tingginya tingkat kesukaan masyarakat kepada Fachri Pahlevi Konggoasa tidak bisa dilihat dari satu

entitas sebagai anggota DPR RI tapi harus diliat dari bahwa endorsement Kery Konggoasa (Bapak dari Fachri Pahlevi Konggoasa) sebagai mantan Kepala Daerah Kab Konawe selama 10 tahun turut memberikan andil persentasi yang tinggi terhadap kesukaan publik kepada anaknya. Hal ini diperkuat dari hasil temuan penelitian ini bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Konawe suka terhadap kepribadian Kery Konggoasa yang tidak berjarak dengan masyarakatnya selama menjabat kepala daerah.

Tingkat popularitas yang tinggi dan Akseptabilitas yang tinggi sangat inheren dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Fachri Pahlevi Konggoasa. Data yang ditemukan dilapangan tingkat keterpilihan Fachri Konggoasa juga mengungguli bakal kandidat yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Grafik 3.
Tingkat Elektabilitas Bakal Calon Bupati Kab. Konawe periode 2024-2029



Sumber: diolah dari data penelitian, 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat diliat bahwa tingkat keterpilihan Fachri Pahlevi Konggoasa masih sangat kompetitif bahkan bisa mengungguli bakal kandidat yang lain. Angka 17% adalah angka yang cukup baik dibanding dengan para pesaingnya untuk memperebutkan kursi bupati Kabupaten Konawe periode 2024-2029. Sementara kandidat lainnya masih berada dibawah angka 10%. Hanya Rusdianto yang menjadi pesaing yang paling dekat tingkat elektabilitas dengan Fachri Pahlevi berada diangka 14,25%. Dengan angka tersebut peluang fachri Pahlevi Konggoasa untuk melanjutkan dinasti Konggoasa di Kabupaten Konawe sangat terbuka dan berpeluang sangat besar.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwa tingkat persebaran dukungan untuk Fachri Pahlevi Konggoasa di Kecamatan yang ada di kabupaten Konawe belum terdistribusi secara merata. Hanya beberapa kecamatan yang akan menjadi lumbung suara untuk keluarga Konggoasa pada PILKADA serentak kedepan. Diantaranya adalah Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Dan Kecamatan Tonggauna. Ada beberapa factor yang membuat politik keluarga Konggoasa mendapatkan dukungan dari beberapa kecamatan tersebut. (1) Kecamatan Wawotobi merupakan daerah asal bagi istri kedua Kery Konggoasa yaitu Vince Sonaru. (2) Kecamatan Amonggedo merupakan daerah asal bapak Fachri Pahlevi konggoasa yaitu Kery Konggoasa. (3) Kecamatan Pondidaha merupakan daerah asal Titin Saranani, (4) Kecamatan Unaaha dan Kecamatan Tonggauna merupakan basis massa Kery Konggoasa Pada Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Tentu basis massa di kecamatan ini dipelihara oleh Kery Konggoasa dengan membangun hubungan emosional dan ikatan yang baik dengan masyarakat.

3.2 Modal Ekonomi Fachry Pahlevi Konggoasa

Menurut (Bourdieu, 2010) modal ekonomi adalah modal paling mudah dikonversi menjadi uang dan dilembagakan dalam bentuk hak milik. Kepemilikan modal ekonomi pada pemilihan kepala daerah adalah hal yang paling prioritas dalam pesta demokrasi 5 tahunan atau PEMILU karena mengingat *Cost* politik untuk menjadi kontestan dalam pemilihan umum baik itu kepala daerah, maupun untuk menjadi anggota legislative sangat tinggi dan modal ekonomi ini merupakan pilar sangat penting dalam menentukan strategi kemenangan dalam Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) mencatatkan bahwa harta kekayaan keluarga Kery Konggoasa yang terdiri dari Fachri Pahlevi Konggoasa, Titin Nurbaya Saranani, dan devi Thesya Feriska Konggoasa mengalami peningkatan pasca Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.
Harta Kekayaan Keluarga Kerry Saiful Konggoasa

No	Nama	LHKPN Pencalonan 2019/LHKPN 2018	LHKPN 31 Desember 2019	LHKPN 31 Desember 2020
1	Kerry Konggoasa	Saiful Rp.4.715.775.006	Rp.6.773.525.000	Rp.9.323.500.000
2	Titin Saranani	Nurbaya Rp.490.000.000	Rp.4.303.871.863	Rp.4.578.677.194
3	Fachry	Pahlevi Rp.400.000.000	Rp. 3.724.500.000	Rp.8.075.500.000

Konggoasa					
4	Devi	Ferisca	Rp.52.239.130	Rp. 337.669.584	Rp.997.745.281

Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa harta kekayaan Titin sebelum pencalonan sebanyak Rp. 490.000.000 dan setelah menjabat sebagai anggota legislatif Provinsi Sultra menjadi Rp. 4.303.871.863 per 31 Desember 2019 dan Rp. 4.578.677.194 per 31 Desember 2020. Sedangkan Fachry Konggoasa memiliki harta kekayaan sebelum mencalonkan pada pemilu legislatif 2019 sebanyak Rp. 400.000.000 dan setelah terpilih menjadi anggota DPR RI harta kekayaannya mencapai Rp. 3.724.500.000 per 31 Desember 2019 dan Rp. 8.075.500.000 per 31 Desember 2020. Sementara Devi Konggoasa memiliki harta kekayaan sebelum mencalonkan pada pemilu legislatif 2019 sebanyak Rp. 52.239.130 dan setelah menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Konawe harta kekayaannya menjadi Rp. 337.669.584 per 31 Desember 2019 dan Rp. 997.745.281 per 31 Desember 2020. Untuk melihat lebih dalam apakah ada relevansi antara modal ekonomi dengan keterpilihan seseorang dalam kontestasi Pemilu, penulis membandingkan harta kekayaan dengan jumlah suara pada saat pemilu anggota legislatif tahun 2024.

Tabel 3.
Data Perbandingan Harta LHKPN dengan Perolehan Suara Anggota DPR-RI Dapil Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Nama	Harta Kekayaan	Jumlah Suara
1	Bahtra	Belum ditemukan	85.596
2	Tina Nur Alam	Rp. 35.444.846.651	68.683
3	Ahmad Safei	Rp. 26. 615.924. 811	58.466
4	Rusda Mahmud	Rp. 9.151.743.005	62.078
5	Ridwan Bae	Rp. 22.075.688.647	84.440
6	Jaelani	Belum ditemukan	116.426

Sumber data: LHKPN (KPK, 2024)

Dari data diatas bisa dilihat jumlah harta kekayaan dengan jumlah suara yang diperoleh pada saat pemilihan anggota legislative. Tina Nur Alam merupakan isteri dari mantan Gubernur Sulawesi tenggara dua priode dengan masa jabatan 2008-2017. Selain itu Tina Nur Alam sudah pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode yaitu 2014-2014, Tina Nur Alam memiliki total kekayaan pada saat mencalonkan anggota DPR RI

sebanyak Rp. 35.444.846.651 dengan total perolehan suara mencapai 68.683 suara. Ahmad Safei adalah Bupati Kabupaten Kolaka dua periode dari tahun 2014-2024, berdasarkan pelaporan harta kekayaan negara sebanyak Rp. 26.615.924.811 dengan total perolehan suara 58.466. (KPU, 2024). Rusda Mahmud yang sebelum terpilih menjadi anggota legislative tahun 2019, merupakan bupati kabupaten Kolaka Utara dua periode 2007-2012, dan periode 2012-2017. Memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 9.151.743.005 dengan total perolehan suara mencapai 62.078 suara. (KPU, 2024). Sementara Ridwan Bae yang merupakan bupati Kabupaten Muna dua periode yaitu tahun 2000-2010 an anggota legislatife dua periode memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 22.075.688.647 dengan jumlah perolehan suara sebanyak 84.440 suara. (KPU, 2024). Sedangkan Bahtra adalah anggota legislative sisa periode 2019-2024 karena menggantikan Haerul Saleh yang terpilih menjadi Anggota Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampai penulis menyusun laporan ini belum ditemukan harta kekayaan di situs LHKPN, tetapi bahtra dalam pemilu legislative tahun 2024 memperoleh suara sebesar 85.596 suara. (KPU, 2024) Dan yang paling mengejutkan publik Sulawesi Tenggara adalah keterpilihan Jaelani sebagai anggota legislative pada pemilu 2024. Jaelani sebelumnya hanya ketua partai politik PKB di DPW Sulawesi Tenggara dan pada saat penulis menyusun laporan ini juga belum ditemukan pelaporan harta kekayaan di situs LHKPN. Tetapi yang menarik adalah sebagai pendatang baru yang berkompetisi di pemilihan legislative tahun 2024 jaelani secara perseorangan mendapatkan suara terbanyak dibandingkan Calon legislatif lainnya. Dengan perolehan suara sebesar 116.426 suara (KPU, 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis bisa menarik sebuah kesimpulan awal bahwa modal ekonomi dalam perebutan keterpilihan dalam pemilu khususnya pemilihan anggota Legislatif tahun 2024 relevansinya tidak signifikan. Hal ini bisa dilihat perolehan suara Bahtra dan Jaelani yang notabeneanya sebagai orang baru dalam memperebutkan kursi DPR-RI dapil SUL-TRA periode 2024-2029 bisa terpilih dengan suara terbanyak mengalahkan kandidat lainnya yang punya *Background* pejabat publik, meskipun harta kekayaannya penulis belum menemukan di situs LHKPN.

3.3 Modal Sosial Keluarga Kerry Saiful Konggoasa

Modal sosial keluarga Kerry Konggoasa selama menjabat dua periode sebagai kepala daerah Kabupaten Konawe menarik bagi penulis untuk memaparkannya terlebih dahulu, karena ini sangat *inheren* dengan tingkat kesukaan masyarakat di Kabupaten Konawe kepada anaknya yaitu Fachri Pahlevi Konggoasa yang akan bertarung untuk menjadi kepala daerah pada periode 2024-2029 mendatang. Modal sosial yang dibangun oleh Kerry Konggoasa dimulai dari mengajarkan nilai-nilai sosial dalam

keluarganya. Hal ini dipertegas oleh data yang ditemukan penulis dalam thesis Devi Sutiawati yang melakukan wawancara langsung dengan Kerry Konggoasa ;

“Pesan ibu saya bahwa apa yang saya dapatkan, sedekahkan ke orang lain, termasuk dalam bentuk perilaku. Sehingga apa yang saya lakukan dapat menjadi amal perbuatan ke orang tua dan saudara saya”. (Wawancara: Kerry Saiful Konggoasa)

Praktik untuk melakukan sedekah dan memberikan bantuan ke masyarakat telah dilakukan Kerry Konggoasa sebelum menjabat sebagai Bupati Kabupaten Konawe. Pembagian sembako dan bantuan lainnya secara intens dilakukan oleh Kerry Saiful Konggoasa kepada masyarakat. Menurutnya sikap dermawan merupakan bentuk dari pengejawantahan nilai-nilai sosial yang disampaikan oleh orang tuanya. Lebih lanjut, Pembentukan modal sosial dilakukan oleh Kerry Saiful Konggoasa dengan berperilaku dan berpenampilan secara sederhana. Beberapa kali peliputan media menampilkan penokohan Kerry yang hanya memakai pakaian kaos, dan celana pendek, saat berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, model komunikasi yang digunakan oleh Kerry Saiful Konggoasa untuk berinteraksi dengan masyarakat adalah dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang dicampur dengan dialek khas Kabupaten Konawe, sehingga cara berkomunikasi mudah untuk diterima oleh Masyarakat.



Gambar 1.

Penampilan Sederhana Kerry Saiful Konggoasa Selama Menjabat Sebagai Bupati Kab. Konawe (Sultra News, 2023)

Pembawaan yang sederhana, komunikasi yang gampang dimengerti oleh rakyat dan memposisikan dirinya tidak berjarak dengan rakyat Konawe, membuat sosok Kerry Konggoasa sangat disukai oleh rakyatnya. Faktor ini menurut berbagai sumber yang di olah oleh penulis menjadikan keluarga Kerry Konggoasa mendapatkan hati masyarakat

pada saat pemilu 2019 yang lalu dapat mengantarkan istri dan kedua anaknya terpilih menjadi anggota legislative propinsi dan Anggota DPR-RI. (koran sultra, 2022)

Pertanyaan yang muncul adalah apakah warisan sosial yang ditinggalkan oleh Kerry Saiful Konggoasa, sehingga Kerry masih di ingat oleh publik dan bisa menjadi modal untuk mengantarkan anaknya yaitu Fachri Pahlevi Konggoasa menjadi Bupati Konawe periode 2024-2029. Penulis mendapatkan ada korelasi yang cukup signifikan antara tingkat kesukaan masyarakat pada Kerry Konggoasa pada saat menjadi Bupati, dan kesukaan masyarakat pada anaknya yaitu Fachri Pahlevi Konggoasa. Penjelasan pada Grafik 2 diatas tentang tingkat Akseptabilitas/kesukaan pada Fachri Pahlevi Konggoasa sangat tinggi dan mengungguli bakal kandidat lainnya, yaitu menyentuh angka 58,25%. Modal sosial ini adalah hal yang paling penting dalam menerjemahkan kompetisi elektoral pada saat Pemilihan kepala Daerah yang akan digelar secara serentak pada bulan November tahun 2024 mendatang.

Penulis mendapatkan garis merah bahwa Kerry Konggoasa memainkan peran yang strategis dalam pemanfaatan modal sosial sebagai upaya untuk membentuk Politik Keluarga. Pada awalnya, modal sosial dalam lingkaran keluarga Kerry berasal dari nilai-nilai sosial yang ditanamkan oleh orang tua Kerry Saiful Konggoasa. Kemudian, nilai-nilai tersebut dijewantahkan dalam berbagai interaksi di masyarakat. Berdasarkan data penelitian dari (Sutiawati, 2019), Setidaknya terdapat tiga Tindakan yang dilakukan oleh Kerry Konggoasa untuk membangun modal sosial yaitu komunikasi, kedermawanan, dan penampilan. Di bidang komunikasi, Kerry Konggoasa telah berhasil untuk berinteraksi dengan masyarakat menggunakan Bahasa keseharian yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Sedangkan pada sesi kedermawanan, Keluarga Kerry Saiful Konggoasa secara intens membagikan bantuan dan sembako kepada masyarakat. Lebih lanjut, Kerry Konggoasa berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok yang sederhana dan berpenampilan apa adanya ditengah masyarakat. Ini sejalan dengan temuan penulis di lapangan bahwa mayoritas responden bekerja di sektor informal dengan komposisi yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sebesar 25,25%, wiraswasta/Pegawai Kontrak dengan persentase 22,25%, Petani/Nelayan sebesar 21,75%, Pekerja/Mahasiswa 9,25%, sementara pedagang dan buruh masing-masing dengan persentase 5% dan 4,5%, PNS/ASN 3,5%, Pengusaha 2,5 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat grafik dibawah ini tentang pekerjaan responden.

Grafik 4.
Pekerjaan Responden



Sumber: Diolah dari data penelitian, 2024

Berdasarkan grafik di atas bahwa rata-rata responden bekerja disektor informal dan ini inheren dengan sikap kesederhanaan/kedermawanan Kerry Saiful Konggoasa dengan tingkat kesukaan masyarakat kepada Kerry selama menjabat sebagai Bupati Kab. Konawe. Inilah yang membuat basis massa Kerry di Kabupaten Konawe semakin kuat. Basis massa tersebut tetap dijaga sehingga bisa diwariskan pada anggota keluarga di pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada bulan November 2024.

Simpulan

Keikutsertaan anggota keluarga petahana dalam kontestasi Pilkada lebih memiliki peluang untuk terpilih dibandingkan dengan kandidat lainnya. Hal itu disebabkan karena pewarisan sumber daya yang dimiliki oleh kepala daerah sebelumnya yang telah dikuasai yang berdampak terhadap dukungan publik kepada kandidat tertentu. Penelitian ini menunjukkan faktor Popularitas, Akseptabilitas, dan keterpilihan Fachri Pahlevi Konggoasa merupakan faktor determinan dari kekuatan dan pengaruh Kerry Sayful Konggoasa (orang tua dan bupati sebelumnya). Pewarisan modal berupa warisan basis massa, warisan birokrasi dan warisan program unggulan merupakan modal yang paling mempunyai pengaruh yang cukup besar.

Meskipun pada Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang bukan hanya diikuti oleh Fachri Pahlevi Konggoasa, tetapi juga diikuti oleh Kandidat lain, tetapi superioritasnya keluarga Kerry Sayful Konggoasa tidak bisa di lihat sebelah mata oleh kandidat yang menjadi lawan Fachri Pahleevi. Indikasi dari bentuk pewarisan tersebut terlihat dari pernyataan terbuka dukungan pemilik modalitas

sebelumnya yang dengan sengaja menunjuk salah seorang kandidat sebagai pewaris beberapa modalitas penting dalam kompetisi di Pilkada yang ada di Kabupaten Konawe yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Allen, N. (2012). *Clientelism and the Personal Vote in Indonesia*. CPSA.
- Arsyad, M., & Nasir, M. (2020). TERPILIHNYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK. *OJS UHO*.
<https://ojs.uho.ac.id/index.php/CALGOVS/article/download/32579/17633>
- Badoh, I. (2010). "Nepotisme ala Reformasi: Pelanggengan Kuasa Orba lewat Sekongkol *Bisnis Politik*." Asasi.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Kreasi Wacana.
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(2).
<https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.1234>
- Fanky, R. (2011). *Strategi Politik Dalam Pemenangan Pilkada: Analisis Kemenangan Telly Tjanggalung Pada Pilkada Di minahasa Tenggara Tahun 2008*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.
- Fitzpatrick, D. (2000). "Indonesian Corporate Governance.", dalam *Indonesia in Transition* (C. Manning (ed.)). ISEAS.
- Hidayati. (2014). Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia. *Orbith*, 10, No 1.
- koran sultra. (2022). penuh kesederhanaan ksk luangkan waktu senggang dengan memancing di rawa. *Koran Sultra*. <https://koransultra.com/2022/03/05/penuh-kesederhanaan-ksk-luangkan-waktu-senggang-dengan-memancing-di-rawa/>
- KPK. (2024). *E-LHKPN*. KPK.Go.Id. <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#>
- KPU. (2024). *Model D hasil Nasional DPR*. sirekap KPU.GO.ID. https://sirekap-obj-formd.kpu.go.id/cfcd/pemilu/0_DD1_pdpr_0_1711122296_59a6c620-25b2-4858-af6a-cc2524593f56.pdf
- MK, J. (2019). loloskan tiga keluarga di pilcaleg,KSK cetak sejarah baru dipangung

- politik SULTRA. *Mediakendari.Com*. <https://mediakendari.com/loloskan-tiga-keluarga-di-pilcaleg-ksk-cetak-sejarah-baru-di-panggung-politik-sultra/45668/>
- News.detik.com. (2024). berapa-daerah-yang-ikut-pilkada-serentak-2024-simak-daftarnya. *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7310656/berapa-daerah-yang-ikut-pilkada-serentak-2024-simak-daftarnya.%0A%0A>
- News, S. (2023). sosok-kesederhanaan-bupati-ksk-terekam-kamera-sedang-makan-bakso-di-pinggir-jalan-viral-di-medsos. *Sultra News*. <https://sultranews.co.id/sosok-kesederhanaan-bupati-ksk-terekam-kamera-sedang-makan-bakso-di-pinggir-jalan-viral-di-medsos/>
- Priatno, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1, No.*
- Sutiawati, D. (2019). *Modal Politik: Politik Keluarga Kery Konggoasa Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Konawe, Sulawesi Tenggara*. Universitas Gadjah mada.
- Yuliantiningsih, T. W., & Adrison, V. (2022). Keterpilihan Dinasti Politik pada Pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*. <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol17/iss2/4/>